

**IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DALAM STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
(Di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik**



OLEH:

RAYNELDA INDRA SANTI BANI

2018210053

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

**IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DALAM STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

(Di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang)

Dosen Pembimbing Utama : Dr Agung Suprojo, S.kom., M.AP

Dosen Pembimbing Pendamping : Abd. Rohman S.Sos., M.AP

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan desa adalah lembaga legislatif yang ada di desa yang berfungsi sebagai a). membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, b). Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, c). Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam menjalankan fungsinya perlu keterlibatan dari berbagai pihak tidak terkecuali perempuan. Dalam BPD kehadiran anggota keterwakilan perempuan adalah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan juga bagian dalam kesetaraan gender di tingkat desa. Penelitian ini ditujukan untuk melihat kedudukan dan fungsi keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa, serta mengetahui apa saja kendala-kendala keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsi BPD. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan datanya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan keterwakilan perempuan pada struktur organisasi BPD masih tidak berubah karena keterwakilan perempuan hanya terdistribusikan pada jabatan anggota II bidang pemerintahan dan pembinaan masyarakat tidak pada jabatan pengurus inti. Keterwakilan perempuan dalam fungsinya mempunyai kesempatan yang sama, yaitu bermusyawarah mufakat dengan anggota BPD laki-laki namun sifat keputusan BPD bersifat kolektif kolegial, sehingga tidak pernah nampak keterwakilan perempuan bagi masyarakat, dengan demikian keterwakilan perempuan pada kedudukan dan fungsi BPD di Desa Mulyoagung masih berorientasi adanya perbedaan untuk kedudukan jabatan internal namun pada pola kerja BPD perempuan dihargai kesetaraannya.

Kata Kunci: Implementasi, Badan Permusyawaratan Desa, Perempuan, Kedudukan Fungsi BPD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga legislatif yang ada di desa yang dalam menjalankan fungsinya perlu adanya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat desa tidak terkecuali perempuan hal ini tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014 Pasal 58 (1). Kehadiran Perempuan di BPD adalah untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan juga sebagai bagian dalam kesetaraan gender di tingkat desa. Keterwakilan perempuan berfungsi untuk menampung hak-hak dan kebutuhan kaum perempuan dalam pembangunan desa sehingga dengan pembuatan peraturan desa yang adil untuk semua kalangan gender baik laki-laki maupun perempuan dalam segala jenis bidang (Kesehatan, Politik dan pendidikan).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, pada kedudukan dan fungsi keterwakilan perempuan pada struktur organisasi BPD kehadiran perempuan selalu dianggap makhluk kedua, sehingga perempuan kurang memperoleh hak-hak yang sama dengan laki-laki khususnya menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam musyawarah. Kehadiran perempuan kurang diperhatikan dalam proses perumusan keputusan, yang hasil keputusan itu juga akan diperoleh perempuan. Kehadiran keterwakilan perempuan dalam BPD pun hanya dijadikan sebagai simbolik adanya kesetaraan gender tetapi dalam menjalankan kedudukan dan fungsinya masih kurang dihargai. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah melekat dan

berpengaruh besar pada masyarakat. (Data diolah dari Jurnal Mirza Fanzikri. (2019).

Pada penelitian ini, peneliti mencoba melihat kedudukan dan fungsi keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa Mulyoagung yang adalah bagian dalam legislatif di tingkat desa. Adanya keanggotaan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa merupakan hal menarik dimana perempuan dalam kedudukannya menjalankan fungsinya sebagai anggota BPD dalam proses pembangunan desa seperti membuat aturan desa, mendengarkan dan menyampaikan aspirasi dimana struktur organisasi BPD selalu dominan dengan laki-laki. Penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan perempuan akan pentingnya keanggotaan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti mengangkat judul **“Implementasi Keterwakilan Perempuan Pada Kedudukan Dan Fungsi Dalam Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi keterwakilan perempuan pada struktur organisasi BPD?
2. Bagaimana kendala-kendala keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsi BPD.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui kedudukan dan fungsi keterwakilan perempuan pada struktur organisasi BPD

2. Agar mengetahui kendala-kendala keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsi BPD

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan melalui penelitian ini bisa menerapkan teori-teori yang sudah diperoleh dari bangku kuliah dan lapangan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru untuk peneliti dalam penerapan teori-teori perihal kedudukan dan fungsi keterwakilan perempuan pada struktur organisasi BPD.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan acuan referensi untuk Kepala Desa serta ketua BPD terlebih di Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Nina., dkk., 2012. *Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI).
- Djafri, Nofrianty dan Syamsu Q. Badu. 2017. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Gorontalo: Ideas Publishing
- Fanzikri, Mirza. 2019. *Partisipasi Perempuan Dalam Kelembagaan Dan Pembangunan Desa Di Aceh*. AL-IJTIMA`I-International Journal of Government and Social Science Vol. 5, No. 1
- Nawawi, H. Wahyudin dan H. A. Yunus. 2013. *Teori Organisasi*. Majalengka: Unit Penerbitan Universitas Majalengka.
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Rauf, Rahyunir dan Sri Maulidia. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru: Hanafa Publishing
- Sakban, Yan Patmawati. 2019. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Pada Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Sumber Jaya Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, Arya. 2021. *Peran Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi*. Jambi: Universitas Islam Negeri Sultan Jambi.

Tesis Sri Sugiarni. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa Di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang". Magister Ilmu Hukum. UNDIP. 2005.hlm.163

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2010. *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintah*. Jakarta: UNDP Indonesia.